

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu prioritas dari pembangunan nasional suatu Negara yaitu pembangunan desa, hal tersebut selaras pada butir ketiga Nawacita Presiden yang menjelaskan bahwa untuk membangun Negara Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah menjadi Negara yang berkerangka kesatuan (Membangun Indonesia, 2015). Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen dan menyalurkan kepedulian terhadap pembangunan desa, melalui peluncuran program presiden memberikan dana sebesar satu milyar untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Tata Kelola (2016) menjelaskan bahwa Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana untuk memajukan dan meningkatkan program pemerintah desa, sehingga suatu desa dapat terbiayai terhadap kepentingan bersama seperti partisipasi masyarakat dengan bergotong royong, dan meningkatkan sumber daya masyarakat bertujuan pada pemerdayaan.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan cara untuk mendorong suatu desa dengan orientasi kemandirian yang memiliki ketahanan seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat pada suatu desa. Tentunya untuk mencapai kemandirian desa yang sesuai dengan Nawacita, diperlukan perhatian dan komitmen dari pemerintah khususnya pada pembangunan desa. Kenyataannya pada suatu desa pembangunan suatu desa jarang sekali dirasa maksimal, dan hingga sekarang akar permasalahannya belum ditemukan

secara detail. Jika permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada suatu desa itu sama, maka dapat dicarikan solusi untuk memperbaiki kekurangan yang dirasa pada saat ini ataupun selanjutnya.

Selain pemerintah, masyarakat desa juga faktor pendukung untuk pergerakan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kumolo (2017) Pembangunan desa dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat desa, yang dilaksanakan dengan memanfaatkan etos kerjasa sama yaitu bergotong royong. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pemerintah desa juga harus menyiapkan rencana bersama pemerintah daerah sehingga capaian ataupun hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dimana pada saat ini perhatian pemerintah desa adalah mencoba menerapkan model baru untuk mengembangkan kegiatan basis ekonomi pedesaan. Kegiatan ekonomi harus menganut paradigma yang dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi. Pemerdayaan ekonomi menjadi urgensi terpenting dikarenakan sebagian besar mata pencarian masyarakat desa ada pada sektor pertanian, sehingga dapat diketahui bahwa sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang besar terhadap suatu pembangunan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Model baru tersebut dengan cara mendirikan salah satu lembaga yang nantinya akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan dari pengalaman yang ada dan telah diterapkan dengan sistem dan mekanisme dibuat oleh pemerintah menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengembangkan kegiatan berbasis ekonomi di

pedesaan. Lembaga tersebut dijalankan secara mandiri tanpa ada intruksi yang mengharuskan masyarakat memenuhi keinginan pemerintah. BUMDes dijalankan berdasarkan keinginan masyarakat dengan memperhatikan potensi pada lingkungan sekitar desa, dengan adanya hal tersebut berarti kepemilikan lembaga ekonomi dikontrol secara bersama oleh masyarakat dan dengan struktur masing-masing (Zukarnain Ridwan, 2014).

BUMDes merupakan turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa. Amanah yang terdapat pada pembentukan UU Desa merupakan harapan pemerintah yang akan membantuk kelembagaan desa yang lebih berkembang dan maju terutama pada aspek ekonomi. UU desa dibuat yang berfungsi untuk mengatur perekonomian suatu desa melalui badan usaha yang dimiliki serta diatur sendiri oleh masyarakat desa itu sendiri. BUMDes bukanlah suatu hal yang baru didalam peraturan pemerintah yang beraspek kemandirian dan kerja sama, maksudnya asas kemandirian merupakan salah satu proses diakan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa untuk memenuhi kemauan dan kebutuhan pada suatu desa (Urgensi BUMDes, 2014).

Perekonomian disuatu desa dapat berkembang dengan berdasarkan asas kemandirian, potensi, kebutuhan, modal, dan kapasitas desa untuk pembiayaan dan menambah asset agar meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaan BUMDes menjadi tolak ukur kedepan agar masyarakat lebih emansipasi dan berpartisipasi penuh terhadap suatu desa. Mengacu dalam penelitian (H.M.Sayuti, 2011), ia mengungkapkan lembaga BUMDes merupakan salah satu motor pergerak dan memperkuat perekonomian desa dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi suatu masyarakat

pada desa. Potensi ekonomi suatu desa dirampung pada suatu wadah dan dikembangkan menjadi unit-unit usaha BUMDes. Melalui usaha-usaha yang didirikan, justru keberadaan lembaga BUMDes yang nantinya dapat akan mengatasi masalah suatu desa, baik itu dari ekonomi ataupun sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penulis I. Kucukaksoy yang mengungkapkan bahwa Smith menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari GNP atau kebutuhan barang yang dapat di produksi dengan biaya yang relative rendah sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri (I. Kucukaksoy, 2011). Dari penjelasan Ismail Kucukaksoy dapat dipahami bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di suatu wilayah.

Perkembangan BUMDes di Indonesia mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Hal tersebut dilihat dari jumlah usaha desa yang berdiri sebesar 8.189 unit, adanya peningkatan karena ditahun 2015 berdiri hana sebanyak 6.274, tahun 2016 sebanyak 14.132, tahun 2017 sebanyak 14.744, tahun 2018 sebanyak 5,874, serta pada tahun 2019 sebanyak 1.878. Pada masa Pandemi di tahun 2020 BUMDes berdiri sebanyak 43. Terhitung secara keseluruhan sudah ada 51.134 BUMDes yang telah berdiri di setiap desa yang ada di Indonesia.

Kabupaten Kerinci terdiri dari 287 Desa dan 16 kecamatan, pada tahun 2018 tercatat dari 287 desa terdapat 102 desa yang memiliki BUMDes. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana sudah tercatat sudah sebanyak 106 desa yang telah

memiliki BUMDes, Pemerintah Desa (Pamdes) Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa pada tahun 2021 dimasing-masing desa minimal memiliki BUMDes masing-masing.

Desa Pandung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi juga memiliki BUMDes, lembaga ini diberi nama BUMDes wisata Pentagen, yang dimana lembaga ini khusus bergerak dalam bidang pariwisata dengan nama Taman Pertiwi Pantagen, yang mana BUMDes ini memanfaatkan sebuah lahan mati berupa rawa yang tidak produktif kemudian disulat menjadi sebuah embung yang memiliki tiga fungsi yaitu;1. Embung desa, 2. Perikanan, 3. Parawisata dan sekaligus ikut serta dalam meningkatkan kemajuan parawisata di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Berdirinya Lembaga BUMDes ini berkat kerjasama antara perangkat Desa, BPD, Anggota BUMDes dan Masyarakat, yang berdiri sejak tahun 2017 dan mulai berjalan pada tahun 2018. BUMDes wisata Pantagen mengalami pengembangan yang pesat pada tahun 2019.

Untuk bergerak di bidang wisata, maka diperlukan beberapa wahana untuk menunjang pariwisata tersebut. Maka dengan menggunakan Dana Desa 2017, Kepala Desa Pandung Talang Genting menganggarkan pengadaan wahana yang bisa menunjang Taman Pertiwi untuk bisa menjadi objek wisata yang sesungguhnya, dimulai dengan pengadaan wahana *Flying Fox*, Sepeda Gantung dan Sepeda Air.

Maka sampai pada saat ini, BUMDes Wisata Pentagen telah memiliki 2 unit usaha Yaitu usaha perikanan, pariwisata. Adapun rencana pengembangan usaha kedepan adalah akan mengembangkan unit usaha bank desa, bengkel *Fiber Glass*, pengelolaan sampah (bank sampah), agro wisata dan penginapan (*Home Stay*).

Dengan adanya BUMDes wisata pentagen ini, sekarang sudah bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa. Terdapat 17 orang pekerja tetap BUMDes yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa di dalam Surat Keputusannya (SK). Dan pada hari-hari tertentu, tepatnya libur hari-hari besar seperti libur Idul Fitri, Idul Adha dan tahun baru, BUMDes wisata pentagen ini bisa menyerap tenaga kerja sampai 80 orang selama libur hari besar tersebut. Selain itu, di sekeliling Taman Pertiwi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa membuka lapak untuk berjualan. Berdasarkan data dari pengurus BUMDes, terdapat 34 lapak yang telah digunakan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat kesejahteraan berupa pendapatan, konsumsi dan pendidikan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.

Berangkat pada uraian masalah di atas, peneliti mengambil topik untuk diteliti tentang BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar terarahnya penelitian ini maka peneliti merumuskan judul tentang **“Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan: Bagaimana Dampak BUMDes Desa Wisata Pentagen Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?

## **1.3 Batasan Masalah**

Kemudian, peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak teralalu luas, adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat dampak sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pendapatan masyarakat Desa Pendung. Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi.
2. Apakah terdapat dampak sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap konsumsi masyarakat Desa Pendung. Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi.
3. Apakah terdapat dampak sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pendidikan masyarakat Desa Pendung. Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak BUMDes terhadap pendapatan Masyarakat Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci provinsi Jambi

2. Untuk mengetahui dampak BUMDes terhadap konsumsi masyarakat Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui dampak BUMDes terhadap pendidikan masyarakat Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci provinsi Jambi

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini nantinya akan bermanfaat sebagai berikut:

- 1 Bagi peneliti dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti untuk mengkaji secara rasional melalui proses ilmiah terhadap dampak BUMDes Wisata Pantagen terhadap kesejahteraan masyarakat BUMDes. Terkait oleh penelitian ini, peneliti juga berharap dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengelola BUMDes wisata Pantagen, serta masyarakat Desa Pendung Talang Genting. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi penelolan lembaga BUMDes di Kab. Kerinci, termasuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terakhir, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya terutama tentang BUMDes.